

IMPLIKASI POSTMODERNISME DALAM PENDIDIKAN

Ainur Rahman Hidayat

Abstrak : Meskipun terminologi postmodern terlalu sulit untuk dikontekskan pada bidang pendidikan secara eksplisit, tetapi kalau memperhatikan tema-tema besar yang diusung oleh postmodernisme maka secara implisit paradigma pendidikan mutakhir--meskipun tidak secara langsung--dalam banyak hal sudah menggunakan akar-akar pemikiran postmodern. Tema-tema pokok yang digulirkan oleh postmodernisme dalam banyak hal berpengaruh pada berbagai pilihan strategi perencanaan pendidikan. Artikel ini berusaha untuk menjawab persoalan tentang pengaruh postmodernisme dalam pendidikan.

Kata kunci: postmodernisme, pluralitas, desentralisasi, pendidikan

Pendahuluan

Kehadiran post-modernisme dalam konstelasi pemikiran manusia telah membuat warna baru yang menarik untuk dikaji. Tidak saja karena kehadirannya cukup menyentak dunia akademik, melainkan juga ia turut membawa pesan-pesan kritis yang melakukan pembacaan ulang atas berbagai tradisi yang selama ini diyakini kebenarannya. Masyarakat (kita) dikagetkan dengan munculnya gejala postmodern yang cukup untuk meluluh-lantakkan dimensi ontologi, epistemologi bahkan aksiologi yang tumbuh dalam pengetahuan dasar masyarakat mengenai realitas. Bagi gerakan postmodern, manusia tidak akan mengetahui realitas yang objektif dan benar. Yang diketahui manusia hanyalah sebuah versi dari realitas, bukan keseluruhannya. Arief Budiman mengatakan, ibarat teks bacaan, realitas yang diketahui manusia merupakan teks yang sudah dibentuk oleh pengarang. Pada titik ini, posmo terjun ke arah relativisme¹.

¹Arief Budiman, "Postmodernisme dan Realitas", dalam *Postmodernisme dan Masa Depan Peradaban*, ed. Suyono, et. all. (Yogyakarta: Aditya Media, 1994), hlm. 21.

Postmodernisme yang semula hanya berkembang dalam bidang arsitektur, mulai merambah ke dalam seluruh bidang kehidupan manusia, justru setelah Lyotard mengintegrasikannya ke dalam filsafat. Pengintegrasian gerakan postmodern ke dalam (ruang) filsafat memberikan konsekuensi logis bagi munculnya ‘pembacaan ulang’ pada setiap dasar kehidupan manusia. Hal ini karena filsafat merupakan pengetahuan dasar yang memberikan konstruksi bagi munculnya setiap bentuk pemahaman (ideologi) dalam masyarakat. Postmodernisme dalam filsafat ini berujung pada sikap kritis (kita) untuk juga mengkaji ulang setiap bentuk kebenaran yang selama ini diterima secara apa adanya. Terminologi inilah yang kemudian dikenal dengan *metode dekonstruksi*, yang dalam banyak hal diusung oleh Derida. Metode dekonstruksi Derida secara *masif* jelas mengusahakan munculnya berbagai bentuk bahasa dekonstruktif atas segala tatanan. Bahasa menjadi ‘kata kunci’ dalam setiap *discourse* postmodern pasca Derida.

Latar Belakang Kelahiran Postmodernisme

Pada dasarnya gerakan postmodern ini muncul sebagai kritik atas kegagalan manusia modern (kehidupan modernitas) dalam menciptakan situasi sosial yang lebih baik, kondusif dan berkeadilan sosial. Munculnya perang, gejolak sosial dan revolusi yang menimbulkan anarki dan relativisme total. Keadaan tersebut melahirkan sejumlah kegelisahan (*epistemik*) berkaitan dengan problem pengetahuan dasar manusia mengenai modernisme yang diklaim mengusung kemajuan, rasionalitas dan sebagainya. Rasio manusia yang oleh masyarakat modern diyakini sebagai suatu kemampuan otonom, mengatasi kekuatan metafisis dan transendental. Yang diyakini pula mengatasi semua pengalaman yang bersifat partikular dan khusus dan (ironisnya) dianggap menghasilkan kebenaran mutlak, universal dan tidak terikat waktu.

Ibrahim Ali Fauzi berpendapat, bahwa asumsi-asumsi mutlak di atas mulai ditolak oleh postmodernis. Mereka berusaha membebaskan diri dari dominasi konsep dan praktek ilmu, filsafat dan kebudayaan modern. Jika dalam visi modernisme, penalaran (*reason*) dipercaya sebagai sumber utama ilmu pengetahuan yang menghasilkan

Implikasi Postmodernisme dalam Pendidikan

kebenaran-kebenaran universal, maka dalam visi postmodernisme hal ini justru dipandang sebagai alat dominasi terselubung yang kemudian tampil dalam bentuk imperialisme dan hegemoni kapitalistik. Sebuah warna yang paling dominan dalam masyarakat modern.² Bahkan menurut Mudji Sutrisno postmodernisme menyadari bahwa seluruh budaya modernisme yang bersumber pada ilmu pengetahuan dan teknologi pada titik tertentu tidak mampu menjelaskan kriteria dan ukuran epistemologi yang 'benar' itu adalah yang real. Dan yang real benar itu adalah 'rasional'.³

Persoalannya, bangunan epistemologi yang demikian, apakah mempunyai pengaruh signifikan dalam bidang pendidikan?. Kalaulah ia terintegrasi dalam filsafat sebagaimana dilontarkan oleh Lyotard, apakah sistem filsafat pendidikan dalam banyak hal juga mulai bersinggungan dengan gejala postmodernisme?. Lalu, bagaimana bentuk keterpengaruhan (kalau memang ada) dalam sistem pendidikan, baik persoalan kurikulum maupun praktek pengajarannya?. Sebab sejak beberapa dekade tema postmodern lebih banyak dikonteks-kan pada seni, arsitektur, kebudayaan dan juga filsafat. Untuk melihat keterpengaruhan tersebut ada baiknya, dipahami dahulu latar belakang kemunculan gejala postmodern dan prinsip-prinsip umum dalam postmodern. Dari penjelasan tersebut dapat secara jelas ditemukan pengaruhnya pada bidang pendidikan.

Pengaruh postmodern terhadap pendidikan sulit untuk dilacak. Hal ini disebabkan sangat jarang *diskursus* postmodernisme dikaitkan dengan masalah pendidikan. Akan tetapi, kalau diperhatikan secara kritis dan mendasar, berbagai bentuk kritik epistemologi yang ditampilkan oleh gerakan postmodernisme yang mengusung tema dekonstruksi, pluralitas, anti-kemapanan, deferensiasi, dan lain-lain, tampaknya secara implisit problem pendidikan mutakhir dapat dilacak bentuk-bentuk keterpengaruhan tersebut.

Sebagai gerakan sosial-pemikiran, postmodernisme 'berhasil' dalam menawarkan opini, melontarkan apresiasi dan menikamkan

²Ibrahim Ali Fauzi, "Postmodernisme Vis a Vis Modernisme", dalam *Postmodernisme dan Masa Depan Peradaban*, hlm. 25.

³Mudji Sutrisno, "Postmodernisme, Tantangan bagi Ilmu Pengetahuan", dalam *Postmodernisme dan Masa depan Peradaban*, hlm. 62.

kritik yang tajam terhadap wacana modernitas dan kapitalisme (global) mutakhir. Daya jelajah yang demikian tentu memberikan suatu tawaran estetis bagi dunia untelektual. Di tengah 'kemapanan' dan pesona yang ditawarkan oleh 'proyek' modernisasi dengan rasionalitasnya, postmodernisme justru (di)tampil(kan) dengan sejumlah 'evaluasi' kritis dan tajam terhadap impian-impian masyarakat modern. Kritik tersebut tidak saja mengagetkan dunia publik intelektualitas (Barat) yang sejak beberapa abad ter'nina-bobo'kan oleh modernisme yang 'membius' melalui ciptaan-ciptaan sains dan teknologinya. Persoalannya, jika postmodernisme lahir sebagai antithesa (kritik) tajam atas bangunan modern, lalu bagaimana dengan kondisi masyarakat yang belum memasuki 'taraf' modern, sebagaimana terjadi di dunia intelektualitas Barat?.

Keseluruhan kritik postmodern diarahkan terhadap bangunan (krisis) modernisme. Berbagai krisis yang menimpa masyarakat modern telah menggiringnya memasuki suatu fase yang oleh Nietzsche dipandang sebagai gejala nihilisme kebudayaan (Barat) modern. Sikap kritis yang bercikal-bakal pada filsuf semacam Nietzsche, J.J. Rousseau, Schopenhaur yang menanggapi modernisme dengan penuh kecurigaan.⁴ Sikap kritis tersebut pada awalnya hanya berada pada tema-tema arsitektur, kesenian (estetika modern), kebudayaan, karya sastra dan terakhir merambah pada dunia filsafat. Artinya, nilai yang mengedepankan dan (hendak) ditawarkan dalam *diskursus* postmodernisme dalam banyak hal adalah betapa gagasan-gagasan dasar seperti 'filsafat', 'rasionalitas' dan epistemologi' yang selama ini dipegang teguh mulai dipertanyakan kembali secara radikal.

Namun demikian, ikhtiar dasar yang hendak dikembangkan dalam postmodernisme adalah perlunya pengkajian ulang atas berbagai terminologi yang selama ini digunakan. Pengkajian ulang ini kemudian menggeser berbagai otoritas yang pernah secara hegemonik membelenggu 'peluang' pilihan pengetahuan manusia. Suatu asumsi yang menarik adalah bahwa masyarakat postmodern dihadapkan dengan banyak tawaran (alternatif) akan kebenaran pengetahuan yang diakuinya sebagai pilihan. Konsekuensi logisnya, kebenaran

⁴Donny Gahral Adian, *Arus Pemikiran Kontemporer* (Yogyakarta: Jalasutra, 2001) hlm. 84.

Implikasi Postmodernisme dalam Pendidikan

pengetahuan tidak lagi bersifat *homology* (kesatuan) melainkan *paralogy* (keragaman).

Keadaan yang demikian tentunya sesuai dengan semangat pengetahuan dasar untuk mengakui adanya pluralitas (dalam) masyarakat. Di lain pihak, pemunculan (isu) postmodernisme merupakan implikasi logis dari terjadinya pergeseran dan peralihan dalam masyarakat secara mendasar. Yasraf Amir Piliang menyatakan bahwa munculnya gejala postmodernisme dilatarbelakangi oleh terjadinya peralihan sejak tiga dasawarsa terakhir ini dari masyarakat industri menuju masyarakat post-industri, dan dari kebudayaan modern menuju postmodern. Peralihan dari masyarakat industri menuju masyarakat post-industri telah mempengaruhi pemahaman masyarakat atas makna-makna di dalam obyek (seni).⁵

Dengan demikian, dapatlah ditelusuri betapa terminologi post-modernisme lebih berkaitan dengan suatu sikap kritis atas segala bentuk kemapanan (*status quo*) yang diciptakan (utamanya) oleh proyek modernisasi. Dominasi paradigma sains, utamanya positivistik dari ilmu-ilmu (alam) telah memberangus kemungkinan munculnya pijakan pemahaman masyarakat atas realitas. Pembelengguan oleh rasionalitas yang diagungkan kebudayaan Barat modern telah memunculkan suatu reaksi yang tidak kalah radikalnya, yaitu apa yang disebut sebagai gelombang postmodern; postmodernisme dan postmodernitas.

Istilah postmodern dilembagakan dalam konstelasi pemikiran kefilosofan oleh Francois Lyotard dalam bukunya *The Postmodern Condition : A Report on Knowledge* (1984). Buku ini merupakan laporan untuk Dewan Universitas Quebec di Kanada yang berisi tentang perubahan-perubahan di bidang ilmu pengetahuan dalam masyarakat industri maju akibat pengaruh teknologi baru. Sehingga teknologi informasi tersebut dengan prinsip kesatuan ontologis yang selama ini mendasari ide dasar filsafat modern, sudah tidak lagi relevan dengan realitas kontemporer. Prinsip homologi (kesatuan ontologis) tersebut akan bergeser seiring dengan pengaruh dahsyatnya teknologi informasi. Untuk itu, prinsip tersebut harus didelegitimasi oleh paralogi atau ide pluralis. Tujuannya agar kekuasaan, termasuk

⁵Yasraf Amir Piliang, *Hiper-Realitas Kebudayaan* (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm.2.

kekuasaan oleh ilmu pengetahuan tidak lagi jatuh pada sistem totaliter. Totaliter biasanya bersifat hegemonik dan pro *status quo*, karenanya realitas tersebut harus dideligitimasi, agar tidak memberangus munculnya kebenaran-kebenaran, bukan sekedar kebenaran tunggal.⁶

Dalam konteks ini Lyotard berusaha mengintrodusir suatu pemahaman bahwa postmodern merupakan suatu periode dimana segala sesuatu itu didelegitimasi.⁷ Delegitimasi tersebut merupakan akibat logis dari perubahan mendasar dari teknologi informasi yang memberikan berbagai informasi yang secara bertubi-tubi datang dalam wilayah masyarakat manapun, dan kapanpun. Ketika posisi pengetahuan dilegitimasi oleh narasi-narasi besar (*grand narrative*) seperti kebebasan, kemajuan, emansipasi, dsb, maka kini, narasi-narasi besar tersebut atau metanarasi telah mengalami nasib sama dengan narasi-narasi besar sebelumnya seperti religi, dialektika, roh, subyektivitas, yang menjadi patokan filsafat modern, yaitu mengalami kehilangan kekuatannya dan menjadi sulit dipercaya. Artinya dalam abad meta-ilmiah ini narasi-narasi besar menjadi tidak mungkin, khususnya narasi tentang peranan dan keahlian ilmu itu sendiri. Maka nihilisme, anarkisme dan pluralisme permainan bahasa menjadi merajalela. Hal ini bagi Lyotard tidak jadi soal, sebab di sisi lain, kondisi ini menunjukkan situasi munculnya kepekaan baru terhadap perbedaan-perbedaan dan keberanian melawan segala bentuk totalitarisme.⁸

Awalan 'post' pada istilah tersebut menimbulkan banyak perdebatan. Apakah 'post' itu berarti pemutusan hubungan pemikiran total dari segala pola kemodernan (Lyotard, Gelner)? Atau sekedar koreksi atas aspek-aspek tertentu dari kemodernan (David Griffin)? Apakah segala hal yang modern itu sedemikian ideologis dan maksiat?. Jangan-jangan postmodernisme itu justru bentuk radikal dari kemodernan itu sendiri, yaitu kemodernan yang akhirnya bunuh diri (Baudrillard, Derrida, Foucault)?. Atau justru wajah arif kemodernan

⁶J-F.Lyotard, *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, (Manchester: Manchester University Press, 1984), hlm.58.

⁷Bambang Sugiharto, *Postmodernisme Tantangan bagi Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 27.

⁸ Lyotard, *The Postmodern Condition*, hlm. 62.

Implikasi Postmodernisme dalam Pendidikan

yang telah sadar diri (Giddens)?. Atau sekedar satu tahap dari proyek modernisme yang memang belum selesai (Habermas)?.⁹

Lyotard sejak awal menolak tiap bentuk metanarasi akan adanya kebenaran tunggal dan universal, yang ada adalah kebenaran-kebenaran. Dalam era postmodern, legitimasi menjadi majemuk, dan mungkin lokal. Kini yang ada adalah narasi-narasi kecil (*mininarrative*) yang melegitimasi macam-macam praktek pengetahuan. Jadi, prinsip pengetahuan dalam era postmodern tidak lagi dilegitimasi pada kesatuan ontologis melainkan pada paralogi. Terminologi ‘kemajuan’ dan ‘rasionalisasi’ merupakan suatu cermin betapa proyek modernitas lebih mengembangkan prinsip *homology* dan mengesampingkan *paralogy*.¹⁰

Pola berpikir yang demikian menjadi sumber kritik postmodern atas modern. Bangunan dasar epistemologi yang memunculkan tipikal masyarakat modern yang *chaos* merupakan implikasi lebih lanjut dari penerapan prinsip epistemologi yang memberangus munculnya alternatif kebenaran-kebenaran. Karenanya, yang dipentingkan sekarang adalah bagaimana memberikan tawaran terbuka bagi basis epistemologi dari struktur dasar pengetahuan dalam masyarakat, tetapi dalam waktu yang bersamaan melakukan pengkajian ulang atas tawaran tersebut. Agar tawaran epistemologi tidak berkembang menjadi sebuah otoritarianisme baru, meski bersembunyi dibalik rasionalisasi dan ‘kemajuan’ bagi masyarakat.

Aplikasi Postmodernisme dalam Pendidikan

Berdasarkan pada berbagai ciri menonjol pada filsafat postmodern maka dapat dilacak dimana letak keterpengaruhan gerakan ini terhadap pendidikan mutakhir. Dimana pendidikan tidak lagi dipahami sebagai peneguhan proses transformasi pengetahuan (*knowledge*) yang hanya dikuasai oleh sekolah (pendidikan formal). Guru dengan demikian tidak lagi dipandang sebagai ‘dewa’ dengan segala kemampuannya untuk melakukan proses pencerdasan masyarakat. Gudang ilmu mengalami pergeseran, tidak lagi terpusat pada guru. Ruang pendidikan tidak lagi harus berada pada ruang-ruang sempit, yang

⁹ Sugiharto, *Postmodernisme*; hlm. 24.

¹⁰ Lyotard, *The Postmodern Condition*, hlm. 254

bernama sekolah, melainkan juga harus dimainkan oleh masyarakat, entah itu melalui pendidikan alternatif maupun melalui pendidikan luar sekolah.

Postmodernisme yang menggunakan tema pluralitas, heterogenitas serta deferensiasi sebagai tema utama adalah bukti betapa pendidikan harus disebarkan melalui berbagai kerja-kerja yang tidak harus dibebankan pada sekolah. Apalagi, realitas membuktikan betapa sekolah justru seringkali memainkan peran dogmatis dan dominannya dalam melakukan *transfer of value* (transformasi nilai) serta *transfer of knowledge* (transformasi pengetahuan). Peran guru, bahkan juga institusi sekolah seringkali menampilkan diri dalam batas-batasnya sebagai pembelenggu kreativitas anak didik; pengajaran dengan lebih menekankan verbalisme, pola Sistem Kredit Semester (SKS) bahkan juga ujian sebagai ukuran terakhir kemampuan anak didik adalah representasi bagi 'penindasan' yang dilakukan institusi tersebut terhadap pengembangan kreativitas anak didik. Beban pelajaran yang sedemikian berat, meminimilisasikan kemampuan anak didik untuk 'melakukan' eksperimentasi berdasarkan kemampuannya secara profesional, karena disibukkan dengan beban-beban yang cukup membeleggu.

Selama ini, pendidikan seolah hanya diarahkan pada pembentukan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga beban berat pengajaran seringkali diarahkan pada penguasaan pada bidang-bidang tersebut. Padahal dalam perspektif postmodernisme, justru masyarakat modern mengalami *degradasi*, krisis moral, krisis sosial dan sebagainya, dimulai dari dominasi iptek dengan penerapan rasio manusia sebagai ukuran kebenarannya, telah mendatangkan persoalan yang cukup berat menimpa masyarakat modern. Rasio manusia *an sich* tidak lagi dapat diharapkan memberikan jawab atas berbagai problem yang muncul dalam masyarakat modern. Sehingga, proses pendidikan yang (hanya) diarahkan pada kepentingan rasio atau nalar rasionalitas justru akan mendatangkan bencana kepada nilai kemanusiaan. Padahal sejak awal diyakini bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai alat untuk memanusiakan manusia. Pengangkatan harkat dan martabat kemanusiaan tidak hanya dapat dimainkan oleh nalar rasio semata, tetapi harus integratif antara nalar rasional dan nalar spiritual.

Implikasi Postmodernisme dalam Pendidikan

Dalam konteks ini tidak berlebihan bila dalam konsep pendidikan (nasional) pengembangan kemampuan anak didik juga diarahkan pada tiga kemampuan dasar yaitu kognitif, efektif serta psikomotorik. Ketidakmampuan mengembangkan ketiga ranah tersebut akan melahirkan *out put* pendidikan yang timpang. Itulah sebabnya, proses pendidikan harus dijalankan untuk memainkan ketiga ranah tersebut agar tetap berjalan. Kritik posmodern atas situasi masyarakat modern sebenarnya juga merupakan kritik atas proses pendidikan yang hanya mengedepankan satu aspek dari keseluruhan nilai yang dimiliki manusia.¹¹

Dalam kondisi yang demikian postmodern tampil memberikan berbagai alternatif bagi proses pendidikan yang harus dijalankan. Kritik mendasar postmodern terhadap modernisme telah memunculkan berbagai tema-tema penting seperti *paralogy* atau pluralisme, deferensiasi atau desentralisasi, dekonstruksi atau kritik dasar atas sebuah tatanan, relativisme, dan sebagainya. Tema-tema inilah yang sesungguhnya memberikan peluang baru bagi munculnya model (paradigma) pendidikan yang diselenggarakan oleh negara ataupun masyarakat.

Desentralisasi Pendidikan: Pergeseran Wacana dari *Grand Naratif* ke *Local Narrative*

Belakangan ini tema tentang desentralisasi pendidikan merupakan problem pendidikan yang cukup mengedepan. Setelah mengadakan pengkajian ulang atas bangunan pendidikan yang ada di Indonesia, saatnya bangsa ini memberikan format baru tentang sistem pendidikan di Indonesia. Ikhtiar reformasi sistem pendidikan nasional tersebut diawali dengan dibentuknya Komite Reformasi Pendidikan (KRP) yang bertugas untuk menyempurnakan Undang-Undang No 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain mempersiapkan RUU Sistem Pendidikan Nasional, KRP juga akan menyiapkan aturan pelaksanaannya. Mengapa harus menyempurnakan UU Sisdiknas?.

Setidaknya ada tiga argumentasi mengapa UU No 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) perlu direvisi (menjadi

¹¹Paul Suparno, *Postmodernisme antara konstruksi dan dekonstruksi* (Yogyakarta: Jalasutra, 1996), hlm. 43.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20/2003) untuk mengelola pendidikan secara demokratis. Pertama, dengan mengesampingkan bahwa UUSPN adalah produk pemerintah Orde Baru, dalam 10 tahun usianya sejak disahkan 27 Maret 1989, muatan UU tersebut dianggap sudah kadaluwarsa. Maksudnya, perkembangan terakhir menunjukkan banyak sekali substansi muatan UU tersebut yang dirasa berbagai kalangan tidak lagi akomodatif bagi kepentingan perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan nasional. Semangat sentralistik yang dianut UU tersebut dalam mengelola pendidikan nasional, selain menjadikan praktik pendidikan nasional sebagai sub-ordinat kekuasaan, juga dirasakan tidak mampu lagi menjawab tantangan kekinian dan kemasadepanan.

Kedua, mau tidak mau, kelahiran UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah (UUPD) dalam beberapa hal mesti berbenturan dengan muatan UUSPN. Dimana UU tersebut mengisyaratkan adanya kewenangan penuh bagi daerah untuk mengelola daerahnya secara mandiri. Terlebih-lebih diketahui, pemerintah pusat tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengelola pendidikan nasional karena Pasal 11 ayat 2 UUPD menyatakan bahwa diantara 11 kewenangan bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai daerah otonom adalah pendidikan dan kebudayaan.

Ketiga, dari berbagai kajian hasil Konferensi Asia Pasifik mengenai pelaksanaan *Education for All* (EFA) yang berlangsung di Bangkok, Thailand pada 17-20 Januari tampak jelas bahwa ada persoalan serius dalam hal pembiayaan pendidikan nasional masing-masing negara, dimana kenaikan nasional setiap negara untuk pendidikan (dasar) cenderung menurun lima tahun terakhir. Bantuan internasional memang naik 3,8 milyar dollar pada 1985, namun kemudian berhenti. Artinya, negara-negara donor gagal memenuhi komitmennya memberi 0,7 % GNP-nya guna membantu negara-negara berkembang, sehingga target alokasi 20 % untuk sektor pembangunan sosial terpenuhi.

Pendidikan di berbagai belahan dunia selalu dipakai sebagai modal dasar pengembangan dan pemilihan kebijakan pembangunan. Hampir di semua negara selalu menggunakan pendidikan sebagai proses pencapaian pembentukan kualitas sumber daya manusia; baik

Implikasi Postmodrnisme dalam Pendidikan

sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan. Negara yang mempunyai konsep dan proses pendidikan yang baik dan modern biasanya menghasilkan *out put* pendidikan yang mempunyai kemampuan melaksanakan segenap agenda pembangunan. Melalui pendidikan; proses pemenuhan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penggalian potensi nasional maupun lokal sebagai pendukung utama keberlangsungan pembangunan dapat terpenuhi.

Memahami aspek pendidikan sebagai bagian yang tidak terpusatkan dalam proses berlangsungnya pembangunan nasional maupun lokal, selayaknya untuk selalu dikedepankan. Selama ini terkesan bahwa pendidikan nasional kita selalu menjadi agenda yang nomor sekian setelah agenda pembangunan bidang ekonomi dan politik. Padahal kedua bidang tersebut tidak pernah bisa berjalan tanpa keberhasilan di sektor pendidikan. Apalagi dalam terminologi memasuki otonomi daerah yang telah dilaksanakan pada bulan Januari 2001 yang lalu, maka sektor pendidikan sebagai sarana awal pemecahan persoalan-persoalan lokal; seperti pemenuhan kebutuhan SDM, penentuan kurikulum yang selaras dengan kebutuhan lokal dan sebagainya, harus menjadi agenda pembangunan yang tidak bisa ditunda-tunda.

Selama ini yang terjadi adalah betapa proses pendidikan selalu tidak sejalan dengan agenda pembangunan lokal. Proses pendidikan, dalam artian pendidikan formal (sekolah) sesungguhnya diterapkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan akan sumber daya manusia (minimal) sanggup menyelesaikan persoalan lokal yang melingkupinya. Setiap proses pendidikan di dalamnya seharusnya mengandung berbagai bentuk pelajaran dengan muatan lokal yang signifikan dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga hasil atau *out put* pendidikan adalah manusia yang sanggup untuk memetakan sekaligus memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Bagaimana mungkin dapat diperoleh keluaran pendidikan yang mengerti kebutuhan daerah (lokal) manakala proses belajarnya tidak pernah bersentuhan dengan kebutuhan-kebutuhan yang memang mengangkat dalam masyarakat.

Berbagai ilustrasi dimunculkan, betapa proses pendidikan yang dijalankan sering kali tercerabut dari akar persoalan riil, tapi ilustrasi

tersebut hanya menjadi bahan pembicaraan yang tidak bergaung. Misalnya, fakta bahwa mayoritas masyarakat Indonesia ada di pedesaan yang *notabene* adalah masyarakat agraris, tetapi dalam praktek pendidikannya hampir tidak berorientasi pada problem masyarakat, khususnya masyarakat desa. Praktik pendidikan yang demikian disinyalir membuat orang sekolahan menjadi asing dan tidak mengenal persoalan yang sedang terjadi disekitarnya. Bahkan tidak jarang, justru banyak produk-produk pendidikan tersebut seringkali melecehkan kehidupan dan pekerjaan masyarakat sekitar misalnya sebagai petani. Hal ini karena anak didik lebih banyak di'intervensi' oleh praktik pendidikan model perkotaan dengan tipikal masyarakat industrialnya sehingga muncul ketidakpercayaan diri anak didik atas profesi sebagai petani dan memilih gaya hidup sebagai priyayi dengan fenomena rebuatan keluaran pendidikan untuk menjadi pegawai negeri sipil atau minimal pekerja di perkantoran.

Selain itu ada sebuah ilustrasi menarik untuk mencoba menggambarkan seringnya praktik pendidikan yang tidak berkorelasi dengan kebutuhan mendasar. Di beberapa daerah pedalaman dan masyarakat terisolir, yang merupakan daerah pedesaan dan perkampungan hutan serta masyarakat nelayan, ditemui suatu kenyataan betapa anak-anak yang seharusnya berada pada jam sekolah tetapi justru melakukan kegiatan atau aktivitas kerja, semisal bertani, mencari rumput, menggembala, berladang di hutan serta mencari ikan dan sebagainya.

Secara spontan kita akan menuduh bahwa kebudayaan masyarakat di tempat tersebut kurang mendukung pembangunan pendidikan dengan adanya kebiasaan orang tua untuk mengajar anak-anak mereka masuk hutan, bertani atau berlayar mencari ikan. Pernyataan tersebut nampaknya mau menunjuk bahwa kebiasaan orang tua mereka untuk masuk ke hutan, berladang dan menangkap ikan adalah *antitesis* tersendiri dari dunia pendidikan yang seharusnya diikuti oleh anak-anak. *Antitesis* dunia pendidikan bisa diperluas cakupannya menyangkut kebiasaan orang tua nelayan yang mengajak anaknya melaut, kebiasaan orang tua perkotaan yang mengharuskan anaknya bekerja di sektor informal.

Implikasi Postmodrnisme dalam Pendidikan

Ketika anak-anak lain sedang menekuni pelajaran di bangku sekolah dengan paket kurikulum yang telah digariskan, anak-anak pedalaman (anak nelayan dan juga anak-anak petani) justru mengikuti orang tuanya berladang menembus hutan belajar tentang dunia hutan sekitar mereka. Mereka belajar tentang kesuburan tanah, bibit tanaman, tanda-tanda alam, pergantian musim, berpindah lahan demi pemulihan kesuburan dan daur alam. Atau anak-anak nelayan yang seperahu dengan bapaknya belajar tentang angin, ombak, kehidupan laut dan sebagainya. Kita jangan bertanya; mengapa mereka tidak bersekolah? Ini soal biaya atau kesempatan?. Karena sesungguhnya mereka belajar tentang keseharian dengan lingkungan yang terdekat; persoalan riil yang mesti dihadapinya, bukan persoalan global yang seringkali jauh dari pikirannya.

Kegagalan membentuk hasil pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan lokal sesungguhnya seringkali menghambat keberhasilan agenda pembangunan daerah yang sudah dicanangkan. Hal ini karena, sekali lagi proses pendidikan yang tidak bersentuhan langsung dengan persoalan kehidupan yang dihadapi oleh anak didik dan masyarakat sekitar.

Tidak berlebihan seorang Antropolog Norwegia, Oyvind Sandbukt yang mengadakan penelitian di kalangan suku Kubu di Jambi yang mengungkapkan tentang pendidikan anak pada orang Kubu; tentang sosialisasi, transmisi pengetahuan tentang kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ditunjukkan olehnya bahwa suku yang dinilai primitif atau terasing memiliki pengetahuan yang mengagumkan tentang lingkungan hidupnya di hutan tropis. Pengetahuan yang sudah menjadi satu paket untuk siap hidup di hutan belantara, tentunya diperoleh melalui proses belajar yang panjang dan dikukuhkan dalam 'kurikulum' yang tidak tertulis, atau dalam satu sistem pendidikan yang berpijak di bumi sendiri. Maka ketika sebagian orang Kubu ini 'dimukimkan kembali' seperti masyarakat lainnya, dan anak-anak mereka ditawari sistem pendidikan modern pada umumnya, tiba-tiba terasa mereka tercerabut dari akar kehidupannya yang paling dalam. Anak-anak pedesaan, pedalaman, nelayan, sebagian di kota,

adalah anak-anak pinggiran yang luput dari perhatian kurikulum. Mereka terbiasa belajar sambil bekerja.¹²

Mendesaknya agenda pengembangan pendidikan dalam rangka pembangunan, baik nasional maupun daerah terkait dengan dua dokumen penting yang keluar beberapa waktu yang lalu yang diperkirakan berdampak langsung pada sistem pendidikan nasional yang layak mendapat perhatian serius. Dokumen pertama adalah rekomendasi jangka panjang Bank Dunia terhadap pendidikan Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi dan moneter sebagaimana tercantum dalam laporan Nomor 18651-IND bertajuk *Education in Indonesian : From Crisis to Recovery* yang berisi tentang kegagalan pendidikan di Indonesia yang dianggap masih belum memuaskan. Sehingga salah satu rekomendasinya adalah mendesaknya diberlakukan desentralisasi pendidikan.¹³

Dokumen kedua adalah keluarnya Undang-undang No. 22/1999 tentang Otonomi Daerah, dimana kabupaten dan kotamadya menjadi basis pengelolaan pemerintah daerah otonom. Pemberlakuan UU No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah secara politis-sosiologis bermakna strategis dalam jangka panjang. Secara politis, UU ini akan mereduksi peranan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang selama tiga dasawarsa telah mengalami proses sentralisasi. UU ini merupakan landasan hukum bagi diberlakukannya proses desentralisasi kekuasaan dengan memberikan Otonomi penuh kepada daerah. Secara sosiologis, UU ini merupakan langkah nyata pemberdayaan daerah.¹⁴

Berkaitan dengan sistem penyelenggaraan pendidikan, maka revisi UU SPN tentang perlunya azas desentralisasi dan otonomi pendidikan merupakan babak baru menguatnya iklim demokratisasi dalam pendidikan nasional. Desentralisasi pendidikan mengandaikan dimulainya pemberian peran lebih besar kepada pemerintah daerah tingkat Kabupaten atau kotamadya sebagai basis pengelolaan pendidikan. Desentralisasi ini berkaitan oleh sebuah keinginan

¹² St. Kartono, "Kurikulum Yang Tidak Tertulis", Bernas (22 Oktober 1996), hlm.4.

¹³ Amich Alhumami, "Sistem Pendidikan Nasional", Kompas (11 September 2000), hlm. 3

¹⁴ Ibid.

Implikasi Postmodrnisme dalam Pendidikan

mendasar bahwa kebutuhan lokal atau juga nilai-nilai sosial-kultural setiap daerah berbeda sehingga memungkinkan diberlakukannya suatu sistem pendidikan yang mengakomodir kebudayaan lokal tersebut.

Desentralisasi pendidikan mengisyaratkan suatu sistem pendidikan yang bersifat *indegenous* (pribumisasi) karena didasarkan pada aspek-aspek dasar dari lokalitas masyarakat. Hal ini agar masyarakat atau peserta didik tidak tercerabut dari akar kebudayaannya. Dengan demikian ada relasi mutualistik antara penyelenggaraan pendidikan dengan situasi lokal yang membutuhkan penjelasan dan pengenalan secara lebih komprehensif.

Sistem ini jelas memberikan peluang terjadinya demokratisasi pendidikan, karena ia tidak lagi terpusat dalam soal penyusunan kurikulum bahkan soal pengangkatan guru. Desentralisasi pendidikan merupakan langkah strategis untuk menguatkan daerah dan memberikan kebebasan dalam menyusun sebuah kurikulum berbasis kompetensi yang belakangan sedang ramai dibicarakan. Peralihan kewenangan dari pusat ke daerah ini bertujuan agar setiap daerah mampu memberikan kontribusi positif bagi pengembangan pendidikan nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan daerah untuk mampu dihadapkan pada wacana global.

Dari uraian tentang desentralisasi pendidikan tersebut tampak jelas betapa tema tentang *local narrative* merupakan pilihan penting untuk menggantikan *grandnarative* yang selama ini mendominasi sistem pendidikan nasional (kita). Awalnya negara memainkan peranan besar untuk menghegemoni sistem penyelenggaraan pendidikan di setiap sekolah. Negara mencoba menerapkan pendidikan yang sifatnya homogen. Situasi ini jelas menjadi tema dan sasaran kritik utama postmodern, yang sejak semula tidak sepakat dengan apa yang disebut sebagai homogen, sebab masyarakat adalah heterogen, baik karakter maupun kebutuhannya. Sehingga menjadi tidak populer kalau negara masih memaksakan kehendaknya untuk mempengaruhi dan menjadikan pendidikan-persekolahan menjadi seragam atau homogen.

Peralihan wacana dari *grandnarative* ke *local narrative* tersebut ditandai dari pergeseran peran yang semula sentralistik menuju desentralistik. Jika dulu negara yang sangat berperan dalam

menentukan berbagai kebijakan menyangkut pendidikan persekolahan, maka dengan diterapkannya sistem desentralisasi, pihak sekolah dan masyarakatlah yang berperan aktif secara profesional mengembangkan sistem pendidikan persekolahannya.

Desentralisasi Pendidikan: Representasi atas Pluralitas

Masyarakat

Penguatan sekolah untuk mengelola pendidikan dengan demikian menjadi semakin signifikan. Artinya, sekolah diberi keleluasaan untuk menerjemahkan prinsip-prinsip desentralisasi pendidikan agar sesuai dengan kesepakatan bersama. Menyikapi rencana dimulainya masa transisi desentralisasi sampai jenjang pendidikan menengah, mulai tahun 2001 pemerintah melakukan usaha-usaha untuk meletakkan landasan yang kuat guna terselenggaranya pendidikan di kabupaten/-kotamadya yang lebih demokratis, transparan, efisien, dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Salah satu cara yang ditempuh adalah diberlakukannya manajemen pendidikan yang berbasis kepada sekolah dan masyarakat. Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan konsep implementasinya. Langkah tersebut meliputi penyiapan konsep dan peraturan yang memungkinkan dilakukannya perintisan pembentukan 'dewan sekolah' (*school board*) di setiap kabupaten/kota, serta pembentukan dan penguatan komite sekolah di setiap sekolah.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah sebuah pendekatan pengelolaan sekolah yang bertitik tolak dari pemikiran, pertimbangan, kebutuhan dan harapan dari sekolah itu sendiri. Meskipun tetap harus mengacu pada standardisasi nasional tentang tujuan pendidikan nasional, MBS tetap memberikan porsi yang kuat terhadap segala inisiatif yang datang dari sekolah. Artinya sekolah dalam menentukan kebijakan pendidikannya akan berakar dan bertopang pada kondisi nyata masyarakat setempat dan bukan lagi mengikuti 'bulat-bulat' petunjuk pemerintah.

Melalui MBS, sekolah akan melaksanakan keinginan masyarakat pendukungnya atau *stake holder*-nya. Mereka dapat terdiri dari orang tua murid, masyarakat, pelaku ekonomi, lingkungan sosial yang

Implikasi Postmodernisme dalam Pendidikan

mempunyai pendidikan yang khas, kebutuhan pembangunan setempat, hingga *policy* otonomi daerah untuk mempercepat kemajuan.

Penerapan MBS adalah indikasi betapa pengelolaan pendidikan lebih mencerminkan pada aspek pluralisme dan heterogenitas masyarakat. Kurikulum pengajaranpun secara sengaja akan disesuaikan dengan kebutuhan lokal, meski tetap memperhatikan situasi global yang melingkupinya. Namun, kebutuhan lokal yang plural tetap menjadi sandaran, mengingat *out put* pendidikan juga harus diarahkan pada pemenuhan kepentingan masyarakat. Setiap kurikulum pendidikan yang ditentukan dengan demikian harus berkorelasi dengan problem sosial yang tengah dihadapi oleh masyarakat.

Dengan penekanan pada MBS dan desentralisasi pendidikan, serta kepentingan kurikulum bermuatan lokal, maka sistem pengajaran yang dijalankan tidak lagi harus memusatkan pada guru sebagai ujung tombak keberhasilan pendidikan, melainkan juga harus ditopang dengan kekuatan masyarakat dan keluarga (tripusat pendidikan). Pengajaran di sekolah formal, misalnya tidak harus menekankan aspek verbalisasi berdasarkan kurikulum (nasional) yang *homogen*, melainkan disesuaikan dengan muatan lokal yang melingkupi kebutuhan masyarakat sekitarnya. Beban materi tidak harus berat dan banyak, sebab hal itu hanya menghasilkan *out put* pendidikan yang tahu banyak hal tetapi sedikit dan tidak mendasar.

Melalui pengajaran yang demikian, maka sebagaimana yang diajarkan oleh postmodernisme tentang realitivisme dan dekonstruksinya, anak didik boleh mengembangkan kreativitas intelektualitasnya secara bebas dan profesional. Guru tidak harus menjadi ukuran kebenaran dalam ilmu, melainkan *partner* bagi anak didik dalam memperoleh pengetahuan melalui pendidikan. Sebagai *partner* maka guru harus mengembangkan kemampuan dasarnya, agar sesuai dengan kebutuhan kurikulum lokal tersebut. Dan sekolah, berfungsi sebagai 'ruang' kondusif dalam sebuah komunikasi tanpa penguasaan. Meminjam istilah Habermas¹⁵ sekolah dengan demikian menjadi ruang terjadinya komunikasi yang emansipatif bagi anak didik. Tampaknya

¹⁵Habermas, *The Philosophical Discourse of Modernity* (Cambridge: Polity Press, 1987), hlm. 46.

ikhtiar ini terinspirasi oleh model gerakan postmodernisme, meski tidak harus sama persis.

Penutup

Demikianlah, bahwa terminologi postmodern terlalu sulit untuk dikontekskan pada bidang pendidikan secara eksplisit. Tetapi kalau memperhatikan tema-tema besar yang diusung oleh postmodernisme maka secara implisit paradigma pendidikan mutakhir dalam banyak hal sudah menggunakan akar-akar pemikiran postmodern.

Namun, yang pasti diperjuangkan oleh kaum postmodern adalah pembelaannya terhadap suatu komunitas dan narasi kehidupan yang tersingkir, yang telah tergilas oleh narasi besar modernisme dengan berbagai dimensi yang dominatif dan imperialistik. Arus pemikiran postmodern bagaikan sebuah protes terhadap berbagai pemikiran yang absolutistik, dan sebagai substitusinya tak lain adalah pendekatan yang bersifat relativistik dan pluralistik dengan sikap kerendahan hati untuk mendengarkan dan mengapresiasi 'yang lain'. Absolutistik tersebut biasanya hadir dalam bentuk dominasi penguasaan ilmu oleh guru dan sekolah kepada anak didik. Dan itu menjadi sasaran kritik dari gerakan postmodernisme. Realitas yang demikian tampak nyata dalam dekonstruksi atas model pendidikan kontemporer yang selama ini digunakan untuk memajukan masyarakat. Kritik-kritik yang digulirkan oleh postmodernisme juga merambah pada dunia pendidikan, yang berakibat semakin dipertanyakannya kemampuan institusi pendidikan (sekolah) dalam memberikan *transformation of value* dan *transformation of knowledge*.

Kenyataan tersebut dapat dilihat dari keinginan untuk melakukan berbagai bentuk revisi atas sistem pendidikan yang selama dijalankan. Misalnya melalui revisi UUSPN Nomor 2/1989 menjadi UUSPN Nomor 20/2003 diharapkan pengembangan pendidikan nasional mengarah pada *accepbilitas* dan partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah. Prinsip ini menunjukkan adanya *progress* kearah yang lebih demokratis, sebab ada peralihan penentuan kebijakan pendidikan di sekolah, dari soal pendanaan sampai kurikulum, oleh pusat kepada daerah dan sekolah. *Wa Allâhu a'lam bi al-shawâb.**